



Inovasi Dagang Kemitraan (I-Daman) Sebagai Upaya Perubahan Menuju *Social Inclusion* di Kabupaten Kutai Kartanegara

Ardiyansah¹

¹Program Studi Manajemen, STIE Al-Khairiyah Cilegon, Banten

Korespondensi: ardiyansah@stie-alkhairiyah.ac.id

Abstrak

Konsep pemberdayaan masyarakat menjadi suatu hal penting yang dilakukan setiap negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan posisi masyarakat yang marginal dan *powerless* lebih berdaya. Pesatnya perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kutai Kartanegara mempengaruhi naiknya tingkat perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini membuat daerah melakukan berbagai inovasi dalam menciptakan kondisi kehidupan masyarakat lokal kearah kondisi *Social Inclusion*. Kabupaten Kutai Kartanegara menciptakan inovasi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan UMKM atau disebut dengan Inovasi Dagang Kemitraan (I-DAMAN). Melalui inovasi dagang kemitraan, UMKM memiliki standar capaian pembinaan melalui konsep *triple helix* antara Pemerintah, Swasta dan Perguruan Tinggi. Dengan pengelolaan UMKM yang profesional oleh pihak swasta, banyak produk UMKM kini memiliki nilai jual yang tinggi dan omzet lebih baik dipasaran sehingga dampaknya dapat menekan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat. Inovasi ini merupakan bentuk upaya perubahan menuju kondisi *social inclusion*.

Kata kunci: inovasi dagang kemitraan, keterlibatan sosial, Kutai Kartanegara, pemberdayaan masyarakat.

Abstract

The concept of community empowerment is an important thing that every country does in improving community welfare and making the position of marginalized and powerless people more empowered. The rapid development of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Kutai Kartanegara Regency has affected the increasing level of the economy and employment. This makes the region carry out various innovations in creating living conditions for local people towards social inclusion conditions. Kutai Kartanegara Regency creates community empowerment innovations through the development of MSMEs or called Partnership Trade Innovation (I-DAMAN). Through partnership trade innovation, MSMEs have a standard of coaching achievement through the triple helix concept between the Government, Private Sector and Universities. With the professional management of MSMEs by the private sector, many MSME products now have a high selling value and better turnover in the market so that the impact can reduce poverty and reduce social inequality in society. This innovation is a form of efforts to change towards social inclusion conditions

Keywords: *community empowerment, partnership trade innovation, social engagement, Kutai Kartanegara*

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 10/02/2020

Ditelaah: 13/04/2020

Diterbitkan: 10/12/2020

KUTIPAN

Ardiansyah. (2020).

Inovasi dagang kemitraan (I-Daman) sebagai upaya perubahan menuju *social inclusion* di Kabupaten Kutai Kartanegara.

PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 1(2), 1-8, doi:

10.47753/pjap.v1i2.18





PENDAHULUAN

Kemampuan inovasi dipahami sebagai tingkat kepercayaan bahwa organisasi sektor publik menghasilkan ide-ide baru untuk meningkatkan penyediaan layanan publik atau pembentukan produk baru (Lee and Choi, 2003). Mengingat bahwa kinerja organisasi sektor publik merupakan hasil dari tindakan kolektif individu yang karenanya bergantung pada manusia, nilai-nilai yang digunakan individu tersebut untuk mengarahkan arah inovasi organisasi menjadi penting dalam memastikan pelanggan yang terus-menerus dan semakin meningkat serta kepuasan karyawan secara keseluruhan.

Untuk memahami inovasi layanan publik, perlu ditelusuri gagasan inovasi untuk mendapatkan ide komprehensif tentang terminologi dan penggunaannya dalam konteks sektor publik. Kata "inovasi" diciptakan oleh Schumpeter pada akhir 1920 (Hansen & Wakonen, 1997; Sweezy, 1943; Ziemnowicz, 2013) untuk menunjuk aplikasi komersial teknologi baru, bahan baru, dan metode baru dalam kemajuan pembangunan ekonomi dan industrialisasi. Dengan demikian, dibandingkan dengan sektor publik, studi inovasi di bidang bisnis dan sektor swasta lebih mapan dalam bidang studi (Fragerberg, Mowery & Nelson, 2005). Apa yang membuat perbedaan antara inovasi publik dan swasta adalah kekuatan pendorong dalam implementasinya. Yang pertama menekankan pada barang publik dan nilai-nilai publik, yang berarti lembaga pemerintah mendorong program inovasi untuk mencapai peningkatan luas dalam tata kelola dan kinerja layanan, termasuk efisiensi dan upaya untuk meningkatkan nilai publik. Sementara yang terakhir terobsesi oleh keunggulan kompetitif dan motif berorientasi keuntungan (Urbancova, 2013).

Inovasi adalah konsep yang kompleks dan telah didefinisikan dengan berbagai cara. Definisi ini sangat condong pada konteksnya, latar belakang disiplin ilmu dan aliran penelitiannya. Sifat lintas-disiplin studi inovasi dan berbagai metodologi juga berkontribusi pada makna yang tersebar. Sederhananya, inovasi dianggap sebagai "melakukan sesuatu secara berbeda" (Hansen & Wakonen, 1997). Di sektor publik, khususnya, mendefinisikan inovasi publik yang berhasil sebagai penciptaan dan implementasi proses, produk, layanan baru dan metode penyampaian dalam memberikan layanan publik. Ini kemudian menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam hasil, efisiensi dan efektivitas atau kualitas layanan publik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia membagi Inovasi pelayanan publik kedalam beberapa kategori, salah satunya adalah kategori inovasi dalam pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat saat ini menjadi suatu hal penting yang dilakukan setiap negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan posisi masyarakat yang marginal dan powerless lebih berdaya. Pada dasarnya pokok pikiran dari teori pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang dalam implementasinya dijabarkan kedalam pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya.

Pendekatan yang bersifat sentralistik, top down telah mengakibatkan masyarakat lokal tidak memiliki akses dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap sumberdaya karena semuanya diputuskan secara terpusat. Posisi masyarakat sekedar sebagai objek, juga mengakibatkan kecilnya peluang untuk aktualisasi diri dan mengembangkan kapasitas. Realitas seperti ini mengakibatkan kondisi kehidupan masyarakat cenderung lebih rendah. Kondisi seperti ini biasa disebut dengan *Social Exclusion*. Kondisi dan mekanisme *Social Exclusion* seperti ini dapat menjadi penyebab kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat (Hall & Midgley, 2004).

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah memiliki tugas penting untuk membuat berbagai inovasi dalam menciptakan kondisi kehidupan masyarakat lokal kearah kondisi *Social Inclusion*. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten yang menciptakan inovasi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan UMKM. Pesatnya perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kutai Kartanegara mempengaruhi naiknya tingkat perekonomian dan penyerapan



tenaga kerja di wilayah tersebut. Data menunjukkan pada tahun 2016, UMKM di Kabupaten Kukar mencapai 54.414 atau menguasai sebesar 99 persen usaha dan menyerap sebesar 117.730 jiwa atau 79 persen dari total serapan tenaga kerja. Namun, perkembangan UMKM ini tidak didukung dengan sistem manajemen kelola yang profesional karena rendahnya sumber daya produktif UMKM. Hal ini disebabkan karena 90 persen dari UMKM yang ada dibentuk by accident not by design. Ketidakteraturan manajemen UMKM ini menyebabkan perebutan ruang publik untuk pembinaan UMKM oleh pemerintah dan dunia usaha, rendahnya akses terhadap sumber daya produktif UMKM, serta lemahnya manajemen produksi dan hilirisasi produk-produk UMKM. Selama ini, produksi UMKM hanya menitikberatkan pada pembuatan produk dan tidak memikirkan strategi pemasaran yang baik. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menciptakan program Inovasi Dagang Kemitraan (I-DAMAN) untuk menyinergikan peran pemerintah, akademisi, dan swasta dalam melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan UMKM serta penyediaan akses bagi sumber daya produktif yang diperlukan (<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/i-daman-jadi-wadah-bagi-umkm-kutai-kartanegara>).

Studi inovasi pertama kali muncul pada 1960-an. Artikel berjudul Inovasi di Lembaga Birokrasi diterbitkan dalam Tinjauan Administrasi Publik (Diamant, 1967). Dua tahun kemudian, sebuah artikel berjudul Reformasi Administratif oleh diterbitkan dengan alasan bahwa inovasi di sektor publik adalah bagian dari reformasi administrasi. Perkembangan penelitian inovasi sektor publik telah menjanjikan masa depan yang cerah (Walker, 2013). Baru-baru ini, minat untuk mengungkap sifat inovasi yang tidak diketahui di sektor publik telah berkembang pesat. Studi komprehensif tentang inovasi sektor publik yang dilakukan oleh (De Vries, Bekkers, & Tummers, 2016) menawarkan tinjauan luas literatur tentang inovasi sektor publik.

Tinjauan sistematis literatur berdasarkan penelitian empiris dari publikasi tertulis bahasa Inggris dalam jurnal peerreviewed internasional mulai Januari 1990 hingga Maret 2014 memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana inovasi berkembang di sektor publik. Sebagai tinjauan sistematis, yang dilakukan inovasi layanan publik di Indonesia 27 secara transparan dari jurnal akademik yang sangat terkenal dan terkemuka, pekerjaan mereka menawarkan analisis yang kuat dan mewakili tubuh literatur dalam penelitian inovasi sektor publik. Berdasarkan studi mereka, beberapa hasil utama telah diidentifikasi. Pertama, sebagian besar studi inovasi sektor publik bersifat kualitatif di mana pendekatan studi kasus digunakan sebagai desain penelitian, sedangkan studi kuantitatif dan metode campuran jumlahnya lebih sedikit. Proporsi terbesar dari literatur yang tersedia berasal dari konteks barat.

Kedua, bagian terbesar dari studi inovasi dilakukan pada tingkat pemerintah daerah, diikuti oleh pemerintah pusat dan organisasi publik dan nirlaba lainnya. Ketiga, banyak studi inovasi menempatkan perhatian utama mereka di berbagai bidang kebijakan diikuti oleh sektor kesehatan, namun beberapa studi meneliti kesejahteraan atau subsektor pendidikan. Akhirnya, anteseden organisasi memainkan peran terbesar dalam memungkinkan semua jenis inovasi sementara inovasi tata kelola sering dihubungkan dengan anteseden lingkungan, termasuk sumber daya dari mitra swasta. Hasil-hasil utama ini telah menginformasikan keadaan penelitian inovasi sektor publik dan seruan untuk analisis yang lebih komprehensif terutama di negara berkembang.

Inovasi sebagai proses adopsi sangat didukung oleh transfer kebijakan dan studi difusi kebijakan (Dolowitz, D., & Marsh, 2000; Evans, & Davies, 1999). Untuk studi ini, inovasi sektor publik disusun oleh kedua aliran konsepsi. Inovasi layanan publik didefinisikan sebagai implementasi ide baru atau modifikasi ide yang telah digunakan dalam konteks lain untuk meningkatkan kinerja layanan publik. Demikian pula, Lembaga Administrasi Negara [Indonesia Institutes of Public Administration (2014)] mendefinisikan inovasi sektor publik untuk menunjuk sektor publik di Indonesia di mana lembaga publik menerapkan kebijakan untuk barang publik yang ditandai dengan orisinalitas.

Dalam konteks organisasi publik, inovasi dispesifikan sebagai inovasi administrasi negara (public administration innovation), yang didefinisikan sebagai “proses memikirkan dan mengimplementasikan



kebijakan penyelenggaraan kepentingan publik yang original, penting, dan berdampak” (Prasteyo, 2017). Lebih lanjut, inovasi administrasi Negara tersebut dapat dibagi ke dalam delapan jenis, yakni inovasi proses, inovasi metode, inovasi produk, inovasi konseptual, inovasi teknologi, inovasi struktur organisasi, inovasi hubungan, dan inovasi pengembangan sumber daya manusia.

Sedangkan Kastle (2015) membagi jenis inovasi organisasi publik dalam lima bentuk, sebagai berikut: (a) menciptakan barang dan layanan baru yang lebih baik; (b) mengembangkan cara baru dalam praktik kebijakan publik; (c) menemukan target pasar baru; (d) mengidentifikasi sumber daya baru; (e) menciptakan cara baru untuk berorganisasi. Menurut Aggola (2013) pada era saat ini inovasi organisasi publik menjadi kebutuhan vital bagi negara. Penyebabnya adalah karena organisasi publik dituntut mampu menjawab tantangan dari globalisasi dan perubahan demografi sekaligus menjaga kualitas pelayanan yang harus diberikan kepada publik. Disamping itu, anjuran pemerintah terhadap inovasi organisasi publik semakin meningkat seiring dengan berkembangnya paradigma New Public Management (NPM) dan New Public Governance (NPG). Dua paradigma administrasi publik ini memiliki doktrin yang sama yakni mendorong kompetisi antar individu, unit atau bagian, dan antar organisasi dalam pemberian pelayanan pada publik. Cara berpikir yang demikian kemudian menjadi energi bagi tumbuh-kembangnya inovasi organisasi publik.

Pemberdayaan Masyarakat melalui Social Inclusion. Pendekatan yang dipergunakan dalam strategi pemberdayaan menurut Soetomo (2013), yaitu: Sentralisasi menjadi desentralisasi, Top down menjadi bottom up, Uniformity menjadi variasi local, System komando menjadi proses belajar, Ketergantungan menjadi keberlanjutan, Social exclusion menjadi social inclusion, dan Improvement menjadi transformation.

Kondisi atau mekanisme Social Inclusion merupakan upaya mengantisipasi kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat lokal. Secara eksternal, negara dan pihak terkait lainnya perlu memberikan kewenangan dan peluang kepada masyarakat lokal untuk menentukan sendiri hal-hal yang menyangkut kehidupannya. Seluruh lapisan masyarakat terutama lapisan bawah mendapat peluang yang setara dalam berpartisipasi pada semua proses kehidupan, dalam mengakses semua pelayanan, serta dalam mengakses informasi dan sumberdaya (Soetomo, 2013).

Social Inclusion dipandang mencakup kondisi yang memungkinkan (seperti pendanaan dan kebijakan pemerintah), dan melibatkan masyarakat lokal. Social Inclusion adalah tentang semua orang yang belajar, apakah profesional atau pengguna layanan. Itu adalah tentang memungkinkan orang untuk maju dengan langkah mereka sendiri, belajar untuk saling percaya, dan merasa nyaman dengan ketidaksepakatan yang tak terhindarkan, kecemasan, dan ketegangan yang datang dengan perubahan (Holtum, 2013). Selain itu Social Inclusion dapat juga dikatakan sebagai praksis positif, di sisi lain, adalah proses peningkatan peluang untuk membangun atau membangun kembali ikatan sosial dengan memfasilitasi akses semua warga negara ke kegiatan sosial, pendapatan, lembaga publik, perlindungan sosial dan program serta layanan untuk bantuan dan peduli (Avramov, 2002). Dalam hal penelitian empiris yang berfokus pada memajukan pemahaman kita tentang Social Inclusion (and exclusion), sejumlah besar literatur telah berusaha mengembangkan langkah-langkah Social Inclusion and exclusion menggunakan data yang ada. Sebagai contoh, Atkinson (2002) menggambarkan proses dimana Uni Eropa (UE) mengadopsi serangkaian indikator umum untuk Sosial Inclusion. Walaupun indikator-indikator ini mencakup hal-hal yang terkait dengan kesehatan, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan, menarik untuk dicatat bahwa indikator-indikator tersebut menekankan pada hasil dari proses sosial, daripada input (yang mungkin termasuk fasilitas di mana individu dapat mengakses lembaga ekonomi dan sosial) (Oxoby, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami perilaku seseorang atau sekelompok orang sebagai penjelas dari



permasalahan manusia atau permasalahan sosial (Creswell, 2009). Secara spesifik penelitian kualitatif akan dilakukan dengan pendekatan analisis dokumen. (Bowen, 2009) menjelaskan bahwa analisis dokumen adalah metode penelitian sistematis untuk mendapatkan arti dari sebuah dokumen. Analisis dokumen merupakan metode penelitian yang berfokus pada pencarian arti mendasar, tema, dan bentuk dari berbagai macam dokumen (Wood, Sebar, & Vecchio, 2020). Analisis dokumen dilakukan dengan mendefinisikan sebuah dokumen untuk menggali arti, memahami, dan mengembangkan pengetahuan empiris. Dokumen berisi naskah atau tulisan dan gambar yang direkam tanpa intervensi dari peneliti. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: buku, jurnal, berita daring, press releases, dan analisa ahli.

Pada penelitian ini analisis dokumen dilakukan dengan merujuk pada metode yang disampaikan oleh Wood et al. (2020) Metode yang dimaksud adalah: (a) “theoretical coding” mengumpulkan data kedalam tema dan konsep; dan (b) membangun cerita atau narasi koheren yang mampu mengaitkan tema yang muncul dari data dan literatur

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Program I-DAMAN telah berjalan sejak bulan Maret 2018. Program ini didesain untuk memberdayakan UMKM untuk mengakses pasar modern dengan pola kemitraan sehingga UMKM dapat dikelola secara profesional untuk dapat menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Kutai Kartanegara. Kemitraan ini merupakan kerja sama tiga pihak yaitu Pemerintah, Swasta dan Perguruan Tinggi, karena selama ini pembinaan UMKM dilaksanakan sendiri-sendiri. Dengan kerja sama kemitraan ini, kita menjadi satu untuk menysasar para pelaku UMKM. Kemitraan melalui program I-DAMAN ini berkaitan dengan penguatan kelembagaan, pembinaan, peningkatan produksi, standardisasi produksi, permodalan, hingga pasar dari produk-produk yang dihasilkan UMKM. Program kemitraan dijalankan oleh pihak swasta melalui Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memberikan akses permodalan dan akses pasar melalui toko modern, seperti Indomaret. Sedangkan pihak universitas melalui Universitas Kutai Kartanegara melakukan pendampingan dan manajerial UMKM dan ditindaklanjuti dengan fasilitasi perizinan, kebijakan, kemitraan dengan swasta dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Melalui program I-DAMAN, UMKM memiliki standar capaian terhadap kegiatan pembinaan yang dilakukan melalui konsep triple helix tersebut. Pembinaan dilakukan melalui pembiayaan oleh pihak swasta untuk sinkronisasi program dan kegiatan sehingga UMKM menjadi mandiri dengan mental pengusaha. Lalu dibantu oleh analisa, kajian, pendidikan kewirausahaan oleh pihak universitas untuk peningkatan kualitas UMKM melalui Laboratorium Unit Kemitraan (LUK). Dengan adanya peningkatan kualitas UMKM, terutama dari produknya, maka akan mempermudah toko modern dalam memperoleh produk lokal dengan kualitas yang dapat bersaing. Masuknya produk-produk UMKM ke toko modern ini juga akan membantu terbukanya pasar sehingga terjadi perputaran omzet yang lebih besar dan berdampak pada kemandirian UMKM.

Pembinaan UMKM diukur dengan menggunakan tiga variabel, yakni kemitraan, produk, dan pasar. Pada awal diluncurkannya program I-DAMAN, jumlah perusahaan pembina hanya 18 perusahaan dengan UMKM binaan berjumlah 74. Berjalan setahun, perusahaan pembina meningkat menjadi 25 perusahaan dengan UMKM binaan sejumlah 95 UMKM. Kemitraan dengan toko modern pun juga bertambah, dari lima toko, bertambah menjadi 21 toko. Hal ini juga diikuti dengan diversifikasi produk yang diproduksi oleh UMKM. Awalnya, hanya ada tiga diversifikasi produk, dan berkembang menjadi enam produk yang berbeda. Produk-produk yang memiliki standardisasi juga bertambah, dari sembilan produk berkembang menjadi 21 produk. Keberadaan Gerai I-DAMAN juga semakin banyak. Pada mulanya tidak ada gerai sama sekali, kemudian menjadi 17 gerai yang bekerjasama dengan Indomaret serta direncanakan satu toko IDAMAN yang akan dibuka di Kecamatan Muara Badak. Kemitraan ini mendorong bagaimana produk (UMKM) bisa bersaing di pasar modern, dengan produksinya yang berkualitas, pengemasannya, sampai mengatur keberlanjutannya. Hal tersebut menjadikan produk tidak hanya bisa bersaing di pasar lokal, tetapi

juga bersaing di pasar modern. Pemberdayaan UMKM melalui program ini menjadikan UMKM tidak hanya sekedar usaha sampingan bagi pegiat UMKM. Penguatan ekonomi ini terwujud atas peningkatan indikator produk yang terstandarisasi sesuai dengan kebutuhan toko modern dan terciptanya pasar terbuka bagi produk-produk UMKM. Dengan pengelolaan yang profesional, UMKM menjadi kekuatan ekonomi bagi masyarakat. Selain melakukan (pemberdayaan) dari sisi UMKM, program tersebut juga berkaitan dengan penguatan fungsi sosial kemasyarakatannya.

Pada dasarnya salah satu tujuan utama Inovasi Dagang Kemitraan ini dibuat adalah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini sesuai dengan prinsip perubahan dari kondisi Social Exclusion menuju kondisi Social Inclusion. Secara keseluruhan pola Kemitraan UMKM di Kabupaten Kutai Kartanegara mampu menekan angka kemiskinan. Hal ini ditunjukkan pada persentase kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara menurun berturut-turut sejak tahun 2016. Pada tahun 2018, persentase kemiskinan di daerah ini sebesar 7,31%, turun 0,26% dari tahun 2017 yang sebesar 7,57%. Secara rinci presentase kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara dilihat melalui grafik 1 berikut.

Grafik 1 Presentase Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, 2015-2018



Grafik diatas menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2015 yang mencapai 8,0% turun menjadi 7,41% pada tahun 2018. Selain itu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu dari 20 Kabupaten/Kota Termakmur di Indonesia yang menempati posisi ke-10 dengan pendapatan Rp. 182,23 juta per kapita. Data ini diukur lewat indikator yang dihitung dari produk domestik regional bruto (PDRB) dan dibagi jumlah penduduk. Menurut data BPS tercatat PDRB di Kabupaten Kukar sebesar 2,12 persen, naik 0,52 persen dari periode sebelumnya yang sebesar 1,6 persen.

Perubahan tersebut terjadi karena adanya inovasi dagang kemitraan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Program tersebut mampu mendorong kualitas usaha mikro kecil dan menengah, sehingga para pelaku UMKM dapat memiliki standar nilai jual serta mampu merubah kondisi masyarakat kearah social inclusion. Inovasi dagang kemitraan digagas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutai Kartanegara tahun 2018, yang bertujuan untuk memberi ruang bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kutai Kartanegara. Program idaman tersebut menggunakan sistem triple helix yang melibatkan, sinergi pemerintah, akademisi, perusahaan, untuk mendukung perkembangan UMKM. Kesuksesan Inovasi Dagang Kemitraan mendapat apresiasi dari berbagai pihak salah satunya adalah Kementerian PAN-RB. Inovasi tersebut masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019.

KESIMPULAN



Seluruh daerah di Indonesia saat ini tengah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan cara yang efektif dalam menekan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah merubah kondisi social exclusion menjadi kondisi social inclusion (Soetomo, 2013). Posisi masyarakat yang hanya sebagai objek mengakibatkan kecilnya peluang untuk aktualisasi diri dan mengembangkan kapasitas. Melalui inovasi dagang kemitraan yang dikembangkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, UMKM memiliki standar capaian pembinaan melalui konsep triple helix antara Pemerintah, Swasta dan Perguruan Tinggi. Dengan pengelolaan UMKM yang profesional oleh pihak swasta, banyak produk UMKM kini memiliki nilai jual yang tinggi dan omzet lebih baik dipasaran sehingga dampaknya dapat menekan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat. Selain itu pada tahun 2019 inovasi dagang kemitraan juga meraih top 99 inovasi pelayanan publik oleh Kementerian PAN-RB.

Saran kedepan bagi perbaikan program adalah penggunaan peran stakeholder lain dalam kontribusi pemberdayaan UMKM melalui peran Media. Kedepannya kemitraan yang dilakukan bukan hanya sebatas pada pendekatan triple helix tetapi berkembang menjadi quadra helix bahkan mungkin berkembang menjadi penta helix yaitu Pemerintah, Swasta, LSM, Perguruan Tinggi dan Media.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggola, J. E. dan J. B. V. L. (2013). Public Sector Innovation Drivers: A Process Model. *J.Soc Sci*, 34(2), 165–176.
- Atkinson, A. B. (2002). Indicators for social inclusion. *Politica Economica*, 18(1), 7–27.
- Avramov, D. (2002). people, Demography, and Social Exclusion. *Number 37 in Population Studies Series*.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative. Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Moxed Methods Approaches Third Edition*. <https://doi.org/10.2307/1523157>
- De Vries, H., Bekkers, V., & Tummers, L. (2016). Innovation in the public sector: A systematic review and future research agenda. *Public Administration*, 94, 146–166.
- Diamant, A. (1967). Innovation in bureaucratic institutions. *Public Administration Review*, 27, 77–87.
- Dolowitz, D., & Marsh, D. (2000). Learning from abroad: the role of policy transfer in contemporary policy-making. *Governance*, 13(5).
- Evans, M., & Davies, J. (1999). Understanding policy transfer: a multi-disciplinary perspectiv. *Public Administration*, 77, 361–385.
- Fraggerberg, J., Mowery, D., & Nelson, R. (2005). *The oxford handbook of innovation*, Oxford. Oxford University Press.
- Hall, A. and J. M. (2004). *Social Policy for Development*. Sage Publications.
- Hansen, S., & Wakonen, J. (1997). Innovation, a winning solution?International. *Journal of Technology Management*, 13, 345–358.
- Holttum, S. (2013). Research Watch: Making social inclusion happen through community-based projects. *Mental Health and Social Inclusion*, 17(4), 172–177. <https://doi.org/10.1108/MHSI-08-2013-0030>
- Kastelle, T. and M. S.-W. (2015). How Does Innovation Work in the Public Service. *Australian Journal of Public Administration*, 74(1), 63–67.
- Lee, H. and Choi, B. (2003). Knowledge management enablers, processes, and organizational performance: an integrative view and empirical examination. *Journal of Management Information Systems*, 20(179–228).
- Oxoby, R. (2009). Understanding social inclusion, social cohesion, and social capital. *International Journal of Social Economics*, 36(12), 1133–1152. <https://doi.org/10.1108/03068290910996963>
- Prasteyo, A. G. (2017). Mengintegrasikan Reformasi Birokrasi Dengan Inovasi Sektor Publik. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 1(1).
- Soetomo. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Sweezy, P. (1943). Professor Schumpeter's theory of innovation. *The Review of Economics and Statistics*, 25, 93–



96.

- Urbancova, H. (2013). Competitive advantage achievement through innovation and knowledge. *Journal of Competitiveness*, 5, 82–96.
- Walker, R. M. (2013). Innovation special issue: Internal and external antecedents of process innovation in local government: A review and extension. *Public Management Review*, 16, 1–24.
- Wood, L. M., Sebar, B., & Vecchio, N. (2020). Application of Rigour and Credibility in Qualitative Document Analysis : Lessons Learnt from a Case Study. *The Qualitative Report*, 25(2), 456–470.
- Ziemnowicz, C. (2013). Joseph A. Schumpeter and innovation. In E. G. Carayannis, (Ed.). *Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship*, 1171–1176.
- <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/i-daman-jadi-wadah-bagi-umkm-kutai-kartanegara>